

Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014

Anita Dhewy

Redaksi Jurnal Perempuan

anita@jurnalperempuan.com

Abstract

Female representation in parliament is decreasing in 2014, from 18 to 17 percent. This is not good news at all. It deteriorates further with no focus on women's status in each of presidential candidates. Status of women, sexual minorities, and other vulnerable groups were not becoming focus of issues in debates. Women's movement in near future and in the long run shall fight hard to tackle previous problems. This 2014 General Election has been a powerful tool as well for women to participate and to voice their concern regarding issues of equality and justice. This study unearths how women usher peaceful campaign during the parliament and presidential elections—showing their political engagement to Indonesia as democratic state.

Keywords: general election, parliament election, roles of women.

Abstrak

Representasi perempuan di parlemen menurun di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini, dari 18 persen di 2009 menjadi 17 persen di tahun ini. Sementara, status perempuan belum terlihat menonjol dalam konteks visi misi Capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, yaitu tidak menjadi materi dalam perdebatan. Ke depan gerakan perempuan perlu berjuang lebih panjang lagi. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjadi alat partisipasi rakyat yang strategis dan bermakna. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, produk Pemilu yaitu parlemen dan presiden-wakil presiden juga relatif bisa dikritik. Kajian ini memaparkan bagaimana perempuan berusaha keras untuk mengawal pemilu damai, demikian juga memajukan suara dan partisipasinya secara politis.

Kata kunci: Pemilu, Pileg, Pilpres, peran perempuan.

Pengantar

Pada 9 April 2014 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilu legislatif. Ada semacam harapan bahwa pada pemilu keempat sesudah reformasi ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat lebih meningkat, sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi yang antara lain mensyaratkan peningkatan partisipasi dan penguatan keterwakilan perempuan dalam ranah politik khususnya di parlemen. Terkait upaya mendorong keterwakilan perempuan dari segi aturan di level undang-undang, Pemilu 2014 menerapkan kebijakan afirmasi yang tidak berbeda dengan pemilu 2009, yaitu aturan kuota dengan *zipper system* sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 2012, yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.7 Tahun 2013 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa persyaratan keterwakilan 30 persen untuk setiap dapil memiliki konsekuensi bagi pencalonan partai. Akan tetapi ketentuan ini tidak mengatur klausul tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut. Menyikapi keberadaan UU Pemilu yang dalam beberapa pasalnya dinilai tidak secara tegas mendukung keterwakilan perempuan, kelompok perempuan yang tergabung dalam Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Januari 2013. Permohonan ini dikabulkan MK pada Maret 2014 dan menguatkan klausul yang memungkinkan pengajuan tiga nama perempuan dalam setiap 3 nama bakal calon dalam daftar bakal calon serta diutamakan calon perempuan jika persebaran perolehan suaranya sama luas dengan calon laki-laki. Namun demikian keputusan ini baru berlaku pada pemilu 2019 dan tidak mengubah susunan daftar caleg pada pemilu 2014 mengingat keputusan MK tersebut baru keluar setelah penetapan daftar calon peserta pemilu selesai. Di luar aspek peraturan formal, upaya mendorong keterwakilan perempuan dan mengawal proses pemilu juga berlangsung di aras gerakan, terutama disuarakan oleh kelompok perempuan yang lintas kategori dan wilayah. Kelompok perempuan tercatat pernah menggelar aksi pada April 2013 untuk menuntut komitmen partai peserta pemilu 2014 dalam mendorong keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan mendukung KPU untuk tetap menjalankan peraturan tersebut.

Namun ternyata apa yang menjadi harapan dalam pemilu legislatif

kemarin tidak terpenuhi. Mengacu pada hasil riset yang dilakukan *Jurnal Perempuan* seperti dipaparkan dalam *Jurnal Perempuan* 81 *Perempuan Politisi*, keterwakilan perempuan di parlemen justru mengalami penurunan. Jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2014 hanya sebesar 17 persen atau 97 kursi dari 560 anggota DPR. Sementara pada pemilu 2009, persentase perolehan kursi perempuan di DPR RI mencapai 18 persen, artinya terdapat penurunan sekitar 1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pencalonan caleg perempuan tidak berbanding lurus dengan keterpilihan caleg perempuan. Pada pemilu 2009 pencalonan caleg perempuan tercatat sebesar 34,86 persen dengan jumlah perempuan yang terpilih sebanyak 18,03 persen. Sementara pada pemilu 2014, pencalonan caleg perempuan meningkat menjadi 37,27 persen dengan jumlah perempuan yang terpilih turun menjadi 17,32 persen. Kewajiban parpol untuk mencalonkan minimal 30 persen caleg perempuan dari seluruh jumlah caleg di setiap daerah pemilihan seperti diamanatkan UU Pemilu dan keberadaan PKPU yang memungkinkan KPU untuk mencoret parpol dari kepesertaan pemilu di dapil yang jumlah caleg perempuannya kurang dari 30 persen, memang berhasil meningkatkan persentase pencalonan caleg perempuan, akan tetapi hal ini tidak secara otomatis juga meningkatkan keterpilihan perempuan.

Usai pemilu legislatif, bangsa Indonesia masih memiliki agenda politik yang juga penting, yakni pemilu presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014. Momen pilpres ini menjadi tantangan untuk mendesak proses demokrasi substansial mengingat 16 tahun pasca reformasi, konsolidasi demokrasi belum juga selesai. Sebagaimana halnya pemilu legislatif, pada pemilu presiden kali ini muncul pula harapan bahwa agenda dan kepentingan politik perempuan dan kelompok minoritas menjadi bagian integral dari visi misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden yang maju pada pilpres 2014, bahwa presiden dan wakil presiden terpilih hendaknya yang memiliki perspektif dan keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperlihatkan bahwa perempuan merupakan separuh dari populasi penduduk yaitu 49,83 persen dari total populasi penduduk Indonesia dan data KPU terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menunjukkan jumlah pemilih perempuan mencapai 92.791.321 orang, sedang pemilih laki-laki berjumlah 93.086.694 jiwa, maka hendaknya para capes dan

cawapres menyadari bahwa suara dan kepentingan perempuan tidak bisa dinafikan. Komitmen pada kesetaraan dan keadilan gender menjadi sebuah keniscayaan. Perempuan harus didengar dan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam pilpres ini kelompok perempuan juga terlibat aktif mengkritisi, mengawasi dan mengawal seluruh proses pemilu. Komitmen para calon pemimpin tersebut dapat dilihat dari rekam jejak dan visi misi capres dan cawapres, karena itu kelompok perempuan mencermati dan mengkritisi visi dan misi yang ditawarkan kedua pasangan capres cawapres dan mendesak kampanye damai di tengah masifnya kampanye tak cerdas dan tak sehat.

Penurunan Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Senin 12 Mei 2014 bertempat di Auditorium Binakarna Hotel Bidakara Jakarta, Pusat Kajian Politik-Departemen Ilmu Politik FISIP UI (PUSKAPOL FISIP UI) menyelenggarakan seminar publik tentang analisis perolehan suara dalam pemilu 2014 dengan tema “Oligarki Politik dibalik Keterpilihan Caleg Perempuan”. Seminar dibuka dengan paparan hasil riset tim PUSKAPOL UI oleh Dirga Ardhiansyah yang mempresentasikan jumlah perolehan suara caleg perempuan semua partai politik peserta pemilu 2014. Dari 12 partai nasional peserta pemilu 2014, jumlah peningkatan perolehan suara caleg perempuan yang paling signifikan adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 22,33 persen. Sementara itu PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu tahun 2014, persentase jumlah suara caleg perempuannya hanya 15,89 persen. Dan persentase jumlah suara caleg perempuan terendah adalah PKS dengan 13,20 persen, sementara untuk keseluruhan caleg perempuan yang terpilih pada pemilu tahun 2014 ini, diperkirakan hanya 14 persen atau sekitar 79 orang. Hal ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2009 yang lalu, dimana keterwakilan perempuan di DPR-RI berjumlah 103 orang atau 18 persen.

Lebih lanjut Dirga mengatakan hasil penurunan ini layak kita kritisi bersama, karena bila kita ukur berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan perempuan di DPR-RI pada pemilu tahun 2009 yakni 33,6 persen, kemudian pada pemilu 2014 ini naik menjadi 37 persen, tetapi jumlah keterwakilannya justru menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dalam

parlemen tidak secara otomatis teratasi dengan dikeluarkannya peraturan teknis yang secara formal ditujukan untuk mengawal proses pencalonan perempuan. Sedangkan untuk caleg perempuan yang terpilih pada pemilu tahun 2014 kali ini, diperkirakan didominasi oleh wajah-wajah baru, karena dari 103 orang anggota parlemen perempuan hanya ada 30 orang saja yang diperkirakan terpilih kembali, dengan kata lain hanya sekitar 34 persen saja.

Masih menurut Dirga kesenjangan antara perolehan suara perempuan dengan perolehan kursi perempuan semakin tajam, pada pemilu tahun 2009 tercatat 22,45 persen rata-rata perolehan suara perempuan untuk DPR RI dengan 18 persen hasil perolehan kursi perempuan. Sedangkan untuk pemilu tahun 2014 tercatat perkiraan 23,42 persen perolehan suara perempuan untuk DPR RI, namun hasil perolehan kursinya hanya mencapai sekitar 14 persen saja. Hal ini disebabkan oleh kebijakan internal partai dalam penentuan kursi yang menjadi aspek penting untuk didiskusikan kembali, bahkan layak diperiksa apakah peningkatan keterpilihan perempuan telah benar-benar menjadi bagian dari komitmen internal partai, atau hanya sekadar pemenuhan syarat administratif saja demi memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan Undang-undang Pemilu.

Sementara hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat hasil riset yang dilakukan PUSKAPOL UI bahwa terdapat penurunan jumlah caleg perempuan terpilih, meskipun persentasenya tidak sebesar perkiraan yang dilansir PUSKAPOL UI. Data KPU memperlihatkan caleg perempuan yang terpilih pada pemilu 2014 berjumlah 97 orang (17 persen), menurun dibandingkan dengan hasil pemilu 2009 yang berjumlah 103 (18 persen). Penurunan ini di satu sisi menjadi lampu merah terutama bagi parpol untuk segera melakukan transformasi internal dan di sisi lain merupakan alarm bagi gerakan perempuan untuk menyiapkan strategi jitu dalam mengawal kinerja legislatif sehingga agenda dan kepentingan perempuan dapat terakomodir.

Ideologi Pancasila

Sementara itu, terkait proses Pemilihan Presiden (Pilpres), kelompok perempuan tercatat aktif terlibat dalam upaya mengawal, mengkritisi

dan menjaga Pilpres agar berjalan demokratis, adil dan damai. Hal ini dilakukan antara lain dengan menyuarakan dan mempromosikan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan bahwa ketika negara ini dasarnya diletakkan pada Pancasila yang lahir pada 1 Juni, maka artinya kita hendak mendirikan negara untuk semua, termasuk juga di dalamnya perempuan. Ia juga mengingatkan peristiwa 69 tahun yang lalu ketika Presiden Soekarno berpidato di depan sidang *Dokuritzu Junbi Cosakai* dan rumusan Pancasila untuk pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara. Rieke berpendapat tidak ada yang salah dengan Pancasila, yang menjadi persoalan selama ini adalah Pancasila belum dijalankan. Pernyataan ini dilansir Rieke dalam acara diskusi “Perempuan Memantau Visi dan Misi Capres” yang diselenggarakan oleh Forum Perempuan Pemantau Presiden pada Minggu (1/6) di Warung Daun Cikini Jakarta.

Lebih lanjut Rieke mengatakan jika diperas, Pancasila mengandung tiga poin penting yaitu: pertama, ketuhanan yang berkebudayaan. Kedua, sosio demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan lagi sekadar demokrasi politik tetapi mencakup juga demokrasi ekonomi. Dimana rakyat tidak lagi digiring dalam kotak-kotak suara dan kemudian ditinggalkan ketika sudah terpilih, tetapi rakyat dilibatkan dalam keputusan-keputusan politik ekonomi. Dan ketiga, sosio nasionalisme. Nasionalisme yang dibangun bukanlah nasionalisme fasis.

Perempuan Mengkritisi Visi Misi Capres dan Cawapres

Hal penting yang juga dilakukan kelompok perempuan adalah membedah, menganalisis dan mengkritisi visi dan misi yang diusung dan ditawarkan oleh dua pasang capres-cawapres yang maju dalam Pilpres 2014, terutama yang terkait dengan isu perempuan. Bicara tentang perempuan dalam visi dan misi yang diusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperlihatkan bahwa perempuan akan menjadi bagian dari bangunan politik maskulin atau politik patriarki yang sangat kental. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang sangat besar bagi Ita Fatia Nadia, aktivis perempuan yang ikut mendirikan Komnas Perempuan, seperti disampaikan dalam diskusi “Perempuan Memantau Visi dan Misi Capres” yang diselenggarakan

oleh Forum Perempuan Pemantau Presiden pada Minggu (1/6) di Warung Daun Cikini Jakarta. Menurutnya visi misi Prabowo-Hatta ditulis dengan pendekatan politik maskulin. Pendekatan ini tidak memberi ruang bagi kelompok-kelompok lain dan menghalalkan cara-cara kekerasan, sehingga berbahaya bagi perempuan.

Lebih lanjut Ita menjelaskan, dalam paparan visi misinya pasangan Prabowo-Hatta tidak bicara tentang keterlibatan masyarakat – termasuk didalamnya perempuan – dalam pembangunan. Lebih jauh perempuan dipandang bukan sebagai individu yang merdeka, tetapi sebagai objek pembangunan negara. Perempuan menjadi bagian dari pembangunan sosial, kesehatan, agama, budaya dan olahraga, artinya menjadi objek dan bukan subjek penting dalam pembangunan. Selain itu perempuan juga dimasukkan sebagai bagian dari kelompok rentan sehingga perlu dilindungi secara efektif dan tidak bicara soal pemberdayaan perempuan. Menurut Ita, pasangan yang diusung oleh koalisi enam partai politik ini mendefinisikan perempuan dalam kerangka imajinasi nasionalisme yang mengontrol masyarakat secara kuat. Hal ini dilakukan dengan menciptakan ruang-ruang formal bagi perempuan seperti yang dilakukan Partai Gerindra lewat pembentukan Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Seperti halnya Orde Baru yang menempatkan perempuan dalam wadah semacam PKK dan Dharma Wanita, hal serupa dilakukan Gerindra lewat faksi perempuan Gerindra. Sehingga kontrol terhadap perempuan akan semakin kuat, terutama kontrol terhadap tubuh perempuan.

Sementara itu visi dan misi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, menurut Ita, secara rinci menjelaskan problem bangsa ini dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan disertai data. Hal yang menarik, menurut Ita, adalah isu perempuan masuk dalam aspek kedaulatan politik – salah satu bagian dari Trisakti yang menjadi ideologi. Hal ini berbeda dengan kebijakan Orde Baru dimana perempuan tidak mempunyai kedaulatan politik. Dari penjabaran kebijakan pemberdayaan perempuan, tampak bahwa posisi perempuan bukan dilindungi secara efektif seperti halnya gagasan pasangan Prabowo-Hatta, tetapi perempuan berdaulat secara politik. Sementara terkait kebijakan penegakan hukum, pasangan Jokowi-JK berkomitmen untuk menghapus seluruh regulasi yang merugikan perempuan dan anak. Selain itu, RUU anti kekerasan seksual juga akan menjadi prioritas Jokowi-JK. Lebih lanjut Ita menyatakan dirinya sepakat

dengan gagasan Trisakti yang ditawarkan pasangan Jokowi-JK, tetapi sebagai aktivis perempuan, ia mengaku tidak bisa hanya berdiam diri, karena ditataran implementasi konsep tersebut bisa tidak terlaksana. Untuk itu Ita mengajak gerakan perempuan untuk mengawasi proses tersebut.

Perempuan Serukan Pilpres Damai

Sementara itu menyikapi proses kampanye pilpres yang sarat dengan penggunaan isu primordialisme dan upaya memecah belah kehidupan bangsa, kelompok perempuan dari berbagai latar belakang dan elemen di sejumlah daerah di Indonesia menggalang kekuatan dan menyerukan pilpres damai. Salah satu diantaranya dilakukan oleh kelompok perempuan di Solo pada awal Juli lalu. Seperti diberitakan oleh Fanny Chotimah dan Dewi Candraningrum berikut ini.

“Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam/mulut bisa dibungkam/namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang/dan pertanyaan-pertanyaan lidah jiwaku..”

(Wiji Thukul, *Sajak Suara*)

Minggu pagi (6/7/2014) di Plaza Sriwedari, Solo, sayup-sayup petikan gitar mengiringi lantunan bait “Sajak Suara” karya Wiji Thukul yang dibacakan dalam acara Doa bersama oleh Aliansi Perempuan Surakarta untuk Pilpres Damai. Berangkat dari keprihatinan atas maraknya Kampanye tidak sehat yang membuat suasana pilpres kali ini terasa mencekam, Nunung Purwanti (dari WKRI – Wanita Katolik RI) selaku koordinator acara menuturkan bahwa dengan adanya dua kontestan Capres yang langsung berhadapan, bisa memicu potensi konflik setiap saat. Sehingga aksi ini mengajak semua pihak terutama perempuan yang mempunyai kontribusi sebagai pihak yang ikut mengendalikan keadaan. Nunung menambahkan bahwa peran perempuan belum terlihat kontribusinya dalam konteks visi misi Capres, misalnya tidak menjadi materi dalam perdebatan. Debat Capres masih normatif, artinya ke depan gerakan perempuan perlu berjuang lebih panjang lagi. Ia melanjutkan, “Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjadi alat partisipasi rakyat yang strategis dan bermakna. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu,

produk Pemilu yaitu parlemen dan presiden-wakil presiden juga relatif bisa dikritik tanpa rasa was-was. Dengan segala kelemahannya, Pemilu masih menjadi pilihan yang terbaik dibanding dengan mekanisme pemilihan pemimpin lainnya”.

Sementara Endang Listiani (Direktur SPEK HAM) menyatakan bahwa runtuhnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998 mengawali era politik multipartai, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Ia melanjutkan, “Salah satu penandanya adalah penyelenggaraan Pemilu yang relatif bebas sejak tahun 1999. Bahkan sejak tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden pun dipilih secara langsung. Namun demikian arah transisi menuju demokrasi di Indonesia masih penuh tantangan. Penyelenggara negara masih banyak yang terlibat korupsi, dan pelanggaran HAM masa lalu pun belum terselesaikan. Pada sisi yang lain masyarakat masih dihadapkan pada ancaman terpecah belah dengan penguatan sentimen berbasis agama dan etnisitas yang membonceng produk demokrasi. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan pun masih terlihat nyata.” Acara ini diawali oleh renungan dan refleksi perorangan, diwakili ibu rumah tangga, aktivis perempuan dan anak muda. Renungan dibawakan secara testimoni akan pengalaman pemilu terdahulu dan pernyataan sikap untuk Pilpres kali ini. Setelah itu dilanjutkan acara musikalisasi puisi oleh perwakilan anak muda dari PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), selain puisi mereka juga menyanyikan lagu “Bersoraklah”. Acara ditutup dengan doa bersama dan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Endang Listiani.

Menyikapi situasi politik terkini menjelang Pemilihan Presiden 2014, muncul kecenderungan adanya ancaman terhadap arah transisi demokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1998. Persaingan ketat antar dua kubu Calon Presiden yang cenderung tidak sehat dan menggunakan isu SARA dan fitnah yang keji untuk menyerang pihak lawan sangat berpotensi mendorong terjadinya konflik-konflik horizontal yang berujung pada aksi kekerasan di tengah masyarakat. Oleh karena itulah, agar Pilpres 9 Juli 2014 ini dapat memperkuat tonggak-tonggak demokrasi, persatuan dan kesatuan, serta perdamaian di Indonesia, maka kemudian Aliansi Perempuan Surakarta untuk Pilpres Damai menyerukan enam hal berikut: (1) Negara harus memastikan birokrasi, TNI, dan Polri bersikap netral dan tidak memihak dalam penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014. (2) Negara harus berupaya maksimal

untuk memastikan proses dan dinamika Pilpres 9 Juli 2014 nanti berlangsung dengan damai, tanpa kekerasan, menjunjung nilai-nilai keberagaman dan keadilan gender. (3) Negara menjamin setiap warga negaranya untuk secara bebas dan aman mengeluarkan pandangan, sikap, dan pilihan politiknya untuk menentukan capres dan cawapres pilihannya. (4) Negara memastikan tidak terjadi kecurangan dan politik uang selama proses Pilpres 9 Juli 2014. (5) Negara memastikan kelompok perempuan, difabel, dan kelompok marginal lainnya dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah, bebas, leluasa, dan tanpa intimidasi. (6) Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap netral dan harus proaktif menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran Pemilu. (7) Capres dan Cawapres yang berhasil menerima mandat rakyat harus menjalankan program-program konkret untuk menghapus berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan menuju penghidupan perempuan yang lebih adil dan bermartabat.

Kesimpulan

Tentu saja peran politik perempuan tidak berhenti dengan selesainya Pileg dan Pilpres. Sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang belum benar-benar mengakomodir kepentingan perempuan dan kelompok minoritas adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di aras kebijakan, sistem pemilu Indonesia yang sejak pemilu tahun 2009 menerapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan suara terbanyak, ternyata memunculkan kompetisi yang sangat terbuka dan menyuburkan politik uang. Imbasnya, caleg perempuan dengan latar belakang "modal" politik, sosial, ekonomi terbatas memiliki peluang yang relatif lebih kecil dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini caleg perempuan kerap kali menjadi korban dan tersisih dari kompetisi yang pragmatis tersebut. Meskipun pada pemilu 2009 dimana sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak diterapkan dan hasil pemilu memperlihatkan adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan, namun sebagaimana hasil riset PUSKAPOL UI—yang dibukukan dengan judul *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*—yang menyimpulkan bahwa hasil perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak pada pemilu 2009 sesungguhnya belum mencerminkan hasil pemilu yang sesungguhnya dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka mengingat perubahan formula

calon terpilih dilakukan secara mendadak sehingga menimbulkan kebingungan banyak pihak, baik partai politik, calon maupun pemilih. Sementara pada pemilu 2014 keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Sehingga perlu dipikirkan perbaikan atas sistem pemilu dan kebijakan afirmasi yang diterapkan. Terkait agenda ini perempuan harus terlibat dengan memberikan gagasan-gagasan alternatif dengan berkaca pada praktik di negara lain.

Di samping itu, upaya untuk meningkatkan angka minimal keterwakilan perempuan di parlemen perlu untuk terus dikejar mengingat 17 persen masih jauh dari angka kritis 30 persen. Selain kuantitas, kualitas anggota legislatif perempuan juga harus ditingkatkan, penguatan kapasitas terhadap anggota DPR RI periode 2014-2019 penting dilakukan agar kehadiran mereka di parlemen memiliki makna bagi perjuangan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini mengingat parlemen merupakan alat negara yang memiliki fungsi merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Sehingga anggota legislatif perempuan mempunyai agenda penting untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan dan kelompok minoritas lewat regulasi dan kebijakan yang adil gender. Peran politik lain yang harus dijalankan perempuan adalah memastikan, mengawasi dan mengawal kebijakan dan program yang dijalankan presiden dan wakil presiden terpilih agar tetap berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas. Selain itu kelompok perempuan juga perlu memastikan agar demokrasi substansial dapat berjalan, dengan mendorong komitmen pengarusutamaan gender dan memastikan pemerintah memberikan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan kelompok minoritas.

Sumber:

Dhewy, Anita. "Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?". *Jurnal Perempuan* 81 (Mei, 2014).

Sri Budi Eko Wardadi, dkk. 2013. *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*. Jakarta. Puskapol Fisip UI.

<https://www.jurnalperempuan.org/menurunnya-jumlah-keterwakilan-di-parlemen.html> ditulis oleh Hasan Ramadhan.

<https://www.jurnalperempuan.org/rieke-diah-pitaloka-kita-hendak-mendirikan-negara-semua-untuk-semua.html> ditulis oleh Anita Dhewy.

<https://www.jurnalperempuan.org/ita-fatia-nadia-visi-misi-prabowo-hatta-terkait-perempuan-munculkan-keprihatinan.html> ditulis oleh Anita Dhewy.

<https://www.jurnalperempuan.org/nunung-purwanti-perempuan-solo-ingin-pilpres-damai.html> ditulis oleh Fanny Chotimah.

<https://www.jurnalperempuan.org/engang-listiani-tujuh-tuntutan-perempuan-solo-untuk-pilpres-damai.html> ditulis oleh Dewi Candraningrum.

Link-link di atas, dari Berita di Website Jurnal Perempuan. (www.jurnalperempuan.org).
<http://data.kpu.go.id/dptA6.php>

E-book Jurnal Perempuan

kunjungi kami di:

<http://www.wayang.co.id/index.php/majalah/jurnal-perempuan>

dan

<http://www.amazon.com/dp/B00EDR2GWG>

langsung dari PC/tablet/iPad anda

